

**PENGARUH DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

SINDY PUTRI NUR RAHMADANNI

NIM: 18043047/2018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

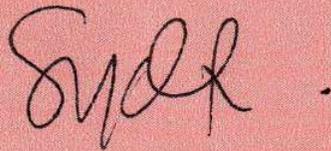
**PENGARUH DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Nama : Sindy Putri Nur Rahmadanni
NIM / TM : 18043047 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh

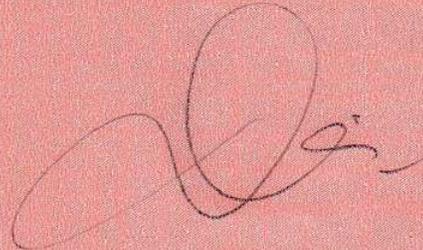
Ketua Departemen Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D

NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

NIP. 19690610 199802 2 001

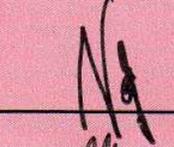
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia
Nama : Sindy Putri Nur Rahmadanni
NIM / TM : 18043047 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	1. 
2	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Herlina Helmy, SE, Ak, M.SA	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindy Putri Nur Rahmadanni
NIM/Tahun Masuk : 18043047/2018
Tempat/Tgl. Lahir : Curup/ 12 Desember 2000
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Ahmad Marzuki, Curup, Bengkulu
No. HP/Telp : 089634075563
Judul Skripsi : Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2022
Saya yang Menyatakan



Sindy Putri Nur Rahmadanni
18043047/2018

ABSTRAK

Rahmadanni, Sindy Putri Nur. 2022. “Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Pembimbing Dr. Deviani, SE., Ak., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh demokrasi terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. (2) Pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. (3) Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Transparansi menggunakan hasil penilaian tingkat transparansi pemerintah daerah dari Komisi Informasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 sampel untuk 3 tahun pengamatan (2018-2020). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan teknik dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan kekuatan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Secara simultan, demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

Kata Kunci: Transparansi, Demokrasi, Kekuatan Politik, Ukuran Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Rahmadanni, Sindy Putri Nur. 2022. “The Effect of Democracy, Political Strength, and Local Government Size of Local Government Transparency in Indonesia”. Thesis. Accounting Departement. Faculty of Economy. Universitas Negeri Padang. Advisor Dr. Deviani, SE., Ak., M.Si.

The aim of this study is to examine: (1) The effect of democracy of local government transparency in Indonesia. (2) The effect of the political strength of local government transparency in Indonesia. (3) The effect of local government size on local government transparency in Indonesia. Transparency is assessed from the result of transparency assessment on local government level from the Commission of Information for Indonesia (Komisi Informasi Indonesia). The study approach used is quantitative. The population in this study is all provinces in Indonesia. The number of samples in this study is 99 samples with 3 observation periods (2018-2020). This study used secondary data by documentation technique.

The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the result of this study indicates that democracy and local government size had a positive and significant effect of local government transparency in Indonesia, while political strength did not affect of local government transparency in Indonesia, Simultaneous test result shows that democracy, political strength, and local government size has significant effect of local government transparency in Indonesia.

Keywords: Transparency, Democracy, Political Strength, Local Government Size

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, penulis panjatkan puji syukur penulis atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia” untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing atas semua arahan, masukan, saran, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan Ibu Herlina Helmy, SE, M.SA, Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis dalam menempuh S1 di Fakultas Ekonomi.
4. Yang paling utama, ucapan terima kasih dan rasa bangga penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu tersayang. Ibu yang selalu memberikan dukungan dan doa disetiap perjalanan dengan kasih sayang serta ketulusan hati yang tak pernah lelah mendengar setiap keluh kesah. Serta Ayah yang memberikan

pelajaran dan kekokohan prinsip yang tegas dan mandiri dalam menjalani kehidupan. Berkat doa Ayah dan Ibu sehingga semua langkah penulis dapat dijalani dengan baik. Semoga segala doa baik yang Ayah dan Ibu panjatkan dapat mengantarkan penulis pada kesuksesan yang sebagaimana diharapkan oleh Ayah dan Ibu.

5. Teruntuk saudara saya tercinta, Bang Rio, Aldo, Yuk Na, Uni Novi terima kasih atas dukungan baik moril maupun materil dan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini.
6. Deby Nofrizaldi, seseorang yang telah menjadi teman, sahabat dan pendamping. Terima kasih telah menemani penulis sedari awal kuliah hingga akhirnya penulis bisa sampai di tahap ini. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, serta mendukung hal baik yang penulis lakukan. Semoga suatu saat kita bisa mewujudkan cita-cita yang telah diimpikan selama ini aamiin.
7. Ara, Putri, Belva dan Taher terima kasih telah menjadi sahabat yang baik semasa kuliah yang memberikan semangat dan dukungan. Semoga suatu saat kita bisa membanggakan keluarga dan mencapai impian yang kita harapkan selama ini.
8. Yona, Salsa, Vira, Aisyah, Valen, Intan, Yuyun, dan Kuntum terima kasih telah menjadi teman pertama penulis selama di perkuliahan. Terima kasih untuk perjuangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.

9. Sahabat-sahabat penulis, Anti, Nada, Aulia, Tascha, dan Novri yang selalu menyemangati penulis meskipun kita berada di kota yang berbeda. Mudah-mudahan kita sukses bersama.
10. Marsel dan Dinda, sahabat penulis yang sudah menjadi pendengar setia penulis sedari awal kuliah. Semoga tercapai cita-cita kita untuk membanggakan kedua orang tua.
11. Nadia dan Ima, teman kos sedari awal perkuliahan yang banyak memberikan dukungan, semangat, serta cerita suka duka selama masa perkuliahan dan diperantauan.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengarapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan peneliti lainnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2022

Sindy Putri Nur Rahmadanni

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Teori Agensi dalam Pemerintahan.....	12
2. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	15
3. Transparansi.....	17
4. Demokrasi.....	19
5. Kekuatan Politik.....	21
6. Ukuran Pemerintah Daerah.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Pengembangan Hipotesis.....	29
1. Pengaruh Demokrasi.....	29
2. Kekuatan Politik.....	31
3. Ukuran Pemerintah Daerah.....	32
D. Kerangka Konseptual.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	37

1. Variabel Dependen (Terikat)	37
2. Variabel Independen (Bebas).....	40
a. Demokrasi.....	40
b. Kekuatan Politik	40
c. Ukuran Pemerintah Daerah.....	41
F. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis	42
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	42
2. Uji Asumsi Klasik.....	42
a. Uji Normalitas.....	43
b. Uji Multikolinearitas.....	43
c. Uji Heteroskedastisitas	44
d. Uji Autokorelasi.....	44
3. Analisis Regresi Linear Berganda	45
4. Uji Hipotesis	46
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F).....	46
c. Uji Parsial (Uji-t)	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	48
2. Uji Asumsi Klasik.....	48
a. Uji Normalitas.....	49
3. Analisis Statistik Deskriptif Setelah Eliminasi Outlier.....	51
4. Uji Asumsi Klasik Setelah Eliminasi Outlier	54
a. Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier	54
b. Uji Multikolinearitas.....	54
c. Uji Heteroskedastisitas	56
d. Uji Autokorelasi.....	57
5. Analisis Regresi Linear Berganda	58
6. Uji Hipotesis	60
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	60
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	61

c. Uji Parsial (Uji-t)	61
B. Pembahasan	63
1. Pengaruh Demokrasi terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia	63
2. Pengaruh Kekuatan Politik terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia	65
3. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah di Indonesia	67
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2. Ringkasan Definisi Operasional	42
Tabel 3. Statistik Deskriptif	48
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 5. Hasil Pengambilan Sampel dengan Data Outlier.....	51
Tabel 6. Statistik Deskriptif Setelah Eliminasi Outlier.....	51
Tabel 7. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	52
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S) Setelah Outlier	54
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser.....	56
Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson.....	57
Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
Tabel 13. Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	60
Tabel 14. Hasil Uji Statistik F.....	61
Tabel 15. Hasil Uji Parsial (Uji-t).....	62
Tabel 16. Simpulan Hasil Uji Hipotesis.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa seluruh badan publik, termasuk Pemerintah Daerah (pemda) untuk mempublikasikan informasi publik setiap kegiatan yang dilakukan. Lembaga yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini adalah Komisi Informasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi merupakan prinsip terbuka dan jujur yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan sumber daya secara terbuka dan menyeluruh sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, transparansi juga merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan (Tahir, 2011). Menurut da Cruz *et al.*, (2016) untuk meningkatkan tata kelola terhadap pelayanan publik diperlukan adanya transparansi yang akan memberikan jalan kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perkembangan perhatian pemerintah terhadap transparansi semakin gencar dilakukan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 yang berisikan agar Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk ikut berpartisipasi mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Agar transparansi dapat terwujud maka pemerintahan dapat menyampaikan informasi kepada publik melalui media agar mudah diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dengan diterbitkannya aturan ini membuat informasi dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimanapun secara online yaitu dengan mengakses *website* resmi daerah masing-masing.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam kerangka prinsipal-agen, pemerintah diberikan tugas untuk membuat informasi yang akurat dan relevan sehingga dapat diakses oleh masyarakat untuk menghilangkan masalah asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam pemerintahan, maka akan mengurangi atau menghilangkan masalah asimetris dalam hubungan keagenan (Krah & Mertens, 2020).

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan yang timbul saat satu pihak (prinsipal) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam hubungan masyarakat

dengan pemerintah, pihak prinsipal diperankan oleh masyarakat, sedangkan agen adalah pemerintah daerah. Dengan adanya teori agensi ini, maka masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal harus terlibat secara langsung untuk mengawasi kegiatan pemerintah daerah (agen). Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan dan menyajikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

Adiputra *et al.*, (2018) menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang demokratis, informasi keuangan yang berkaitan dengan dana yang dikumpulkan, dibelanjakan, dan diinvestasikan diungkapkan kepada publik memungkinkan masyarakatnya melakukan penilaian atas akuntabilitas pemerintah daerah. Peningkatan transparansi dibutuhkan untuk memenuhi fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan berdampak pada pemborosan.

Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mempublikasikan informasi keuangan melalui *website* resmi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Di Indonesia hampir seluruh pemerintah daerah telah memiliki *website* resmi, namun pemanfaatan *website* untuk keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah masih minim (Al Asyari & Helmy, 2020). Fenomena ini salah satunya terjadi di Sumatera Barat yang dijelaskan dalam penelitian Agustin (2014). Dalam risetnya ditemukan bahwa kesungguhan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam memanfaatkan *website* resmi masing-masing untuk mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran daerah masih

sangat rendah. Dari 19 kabupaten/kota yang diteliti, hanya terdapat 9 kabupaten/kota yang menyediakan data transparansi pengelolaan anggaran daerah ataupun data lainnya di *website* resmi secara lengkap dan konsisten.

Penelitian Ritonga & Syahrir (2016) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di 34 pemerintah provinsi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 16,84%. Sebelum itu, Martani *et al.*, (2013) juga melakukan penelitian mengenai tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Dari total 491 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya 429 *website* pemerintah daerah yang bisa diakses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja *website* resmi pemerintah daerah hanya sebesar 15%.

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) mengenai Keterbukaan Informasi Publik hingga saat sekarang belum berjalan sesuai harapan (Muhtar *et al.*, 2017). Meskipun telah diatur dalam undang-undang, namun masih banyak badan publik yang belum menyediakan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP tersebut. Evaluasi transparansi badan publik, termasuk pemerintah daerah penting dilakukan untuk menjamin bahwa UU KIP telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Badan publik pemerintah provinsi belum sepenuhnya patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau dikenal dengan UU KIP. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2020

menunjukkan bahwa dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, hanya 10 pemerintah provinsi yang dikategorikan informatif, 5 pemerintah provinsi menuju informatif, 9 pemerintah provinsi cukup informatif, 3 pemerintah provinsi yang kurang informatif, dan 7 pemerintah provinsi yang tidak informatif.

Pengamat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri (mediaindonesia.com 18/09/2017) menyatakan bahwa penyebab terhambatnya proses transparansi pemerintah daerah kemungkinan terjadi karena sulitnya mendapatkan informasi publik karena setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki tingkat kompleksitas, dan jenis masyarakat yang berbeda-beda pula. Masyarakat di beberapa daerah pun kurang diedukasi mengenai apa pentingnya mengetahui pengelolaan dan jalannya pemerintah secara transparan. Adanya transparansi berarti pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat aktif bersama pemerintah dalam pembangunan di daerahnya. Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah juga membuktikan bahwa pemerintah daerah sebagai penerima amanat telah menjalankan amanah yang diberikan masyarakat sebaik mungkin dan ingin terus dipercaya oleh masyarakat.

Pemerintah provinsi harus mempunyai pondasi yang kokoh dan kuat karena pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan juga sebagai wakil daerah di pemerintahan pusat. Tugas pemerintah provinsi dalam membuat regulasi dan membawa dampak perubahan yang positif, akan

membuat kota/kabupaten yang berada di bawah kendalinya pun juga akan mengikuti pola perilaku institusi yang berada di atasnya.

Penelitian ini dilakukan dengan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu tahun 2018-2020 hal ini karena pemilihan kepala daerah 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 menjadi sorotan, dengan terpilihnya kepala daerah yang baru akankah membawa perubahan yang berarti bagi regulasi dan pembangunan daerah tersebut. Begitupun, dengan transparansi yang dilakukan oleh kepala daerah yang baru atau kepala daerah yang meneruskan jabatan akankah ada perubahan untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tahun 2018 merupakan tahun pemilihan kepala daerah (pilkada) terbesar yang dilakukan serentak oleh 17 provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, sedangkan pilkada tahun 2017 yang digelar serentak tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh 7 provinsi di Indonesia. Kemudian, sisanya sebanyak 10 provinsi mengikuti Pilkada tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Polemik yang terjadi akibat pergantian kepala daerah inilah yang menjadikan sorotan terhadap transparansi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru seakan terdesak untuk lebih transparan dibidang apapun. Pilkada besar-besaran terjadi pada tahun 2018 dan beberapa Gubernur yang baru saja dilantik sudah menjadi tangkapan KPK di tahun 2019. Gubernur provinsi Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf merupakan gubernur yang meneruskan jabatan hingga periode 2 namun di awal periode 2-nya, Irwandi ditangkap KPK setelah terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan)

pada 3 Juli 2018. Hal ini juga terjadi pada Gubernur Bengkulu, Gubernur Jambi dan Gubernur Kepulauan Riau yang mana gubernur tersebut ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi di masa jabatannya menjabat sebagai Gubernur yang baru dilantik.

Relatif rendahnya transparansi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia menjadi isu yang cukup *urgent* untuk diperbaiki, mengingat adanya media *website* yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengungkapkan kinerjanya secara transparan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti transparansi pemerintah daerah melalui *website* pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya agar selanjutnya dapat menghasilkan rekomendasi untuk mewujudkan transparansi pemerintah daerah yang lebih baik.

Faktor pertama yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yaitu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat, apabila partisipasi masyarakat tinggi, maka menunjukkan bahwa pemerintah mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara, maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan, dan evaluasinya (ombudsman.go.id, 2020). Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat

dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Kraah & Mertens (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa demokrasi berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah dan hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa demokrasi mampu meningkatkan transparansi (Bauhr & Grimes, 2014; Curtin & Meijer, 2006; Fairbanks *et al.*, 2007). Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ketika demokrasi tumbuh di suatu negara, maka disposisi transparansi pemerintah daerah meningkat.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yaitu kekuatan politik. Kekuatan politik menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh dan dukungan partai politik akan menghasilkan lingkungan partai politik akan menghasilkan lingkungan partai yang kompetitif maka akan semakin besar pula tekanan pada pemerintah untuk melakukan transparansi (Dowley, 2006). Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari partai politik yang mengusungnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Dowley (2006) kepala daerah yang didukung oleh partai mayoritas atau partai pemenang dalam pemilu memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat sehingga semakin sedikit ruang untuk pemerintah dalam menyembunyikan kegiatan pemerintah daerah, terutama yang penting seperti keputusan anggaran. Hal ini akan menimbulkan tuntutan dari masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan informasi yang lebih baik sehingga mendorong adanya keterbukaan informasi yang lebih besar pula (Sutaryo & Tri Amanu, 2020). Penelitian yang

dilakukan oleh Tejedo-Romero & de Araujo (2015) dan Tavares & da Cruz (2017) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah, namun penelitian yang dilakukan oleh Pranaswati & Kiswanto (2020) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kekuatan politik dengan transparansi pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan ukuran yang memperlihatkan besarnya aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Nosihana & Yaya (2016) menyatakan bahwa aset dapat menggambarkan seberapa besar pemerintahan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan bahwa semakin banyak juga modal yang ditanam. Hal tersebut berdampak pada pengawasan yang ketat dari masyarakat karena khawatir akan terjadinya penyelewengan dana oleh pemerintah daerah, sehingga transparansi pemda dibutuhkan untuk mengurangi asimetri informasi terhadap masyarakat. Krah & Mertens (2020) dalam penelitian menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah ditemukan berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nosihana & Yaya (2016) dan Trisnawati & Achmad (2013). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al.*, (2005), Adiputra *et al.*, (2018), dan Wau & Ratmono (2015) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah.

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi

pemerintah daerah peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DEMOKRASI, KEKUATAN POLITIK, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1. Se jauh mana pengaruh demokrasi terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia?
2. Se jauh mana pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia?
3. Se jauh mana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh demokrasi terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia
2. Pengaruh kekuatan politik terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia
3. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi akademisi, pemerintah, masyarakat, dan juga bagi penulis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur akuntansi sektor publik dengan menghubungkan demokrasi, kekuatan politik, dan ukuran pemerintah daerah dengan transparansi di pemerintah daerah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang pentingnya menganalisis faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai informasi dan menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia.